



Tinjauan Atas Penyusutan Anggaran Belanja Pada Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang

Enjang Muhamad Idris¹, Achmad Nawawi²

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 03 Januari 2024
Revised : 09 Januari 2024
Accepted: 16 Januari 2024

The purpose of this study is to review the expenditure budget at the Karawang Regency Environmental Agency in 2022 which is calculated annually. The results of this review also show adjustments to the preparation of the Expenditure Budget with the provisions of the government This review was conducted from January to March 2022.

The data used in this review is primary data, the data process is also collected according to the field. Requires a long time and looking for valid accurate. From the results of this review shows the preparation of the expenditure budget at the Karawang Regency Environmental Service in 2020-2022 in terms of (1) Understanding the Budget (2) Budget Preparation Process (3) Understanding the Expenditure Budget (4) Budget adjustments at the Karawang Regency Environmental Service.

Keywords: Budget Preparation, Definition of Expenditure Budget, Budget Realization, Expenditure Budget.

(* Corresponding Author: enjangmhmdids@gmail.com

How to Cite: Idris, E. M., & Nawawi, A. (2024). Tinjauan Atas Penyusutan Anggaran Belanja Pada Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10516073>

PENDAHULUAN

Dalam sebuah penyusunan biaya untuk mengetahui kemajuan pemasukan dan pengeluaran kondisi ekonomi oleh suatu negara, perusahaan, maupun lembaga-lembaga besar menginginkan suatu kinerja yang baik dalam pengambilan keputusan dari berbagai rencana kerjanya. Hal ini akan dilakukan semaksimal mungkin agar suatu kinerja pembiayaan sebuah perusahaan ataupun lembaga-lembaga besar dapat terkendali dengan baik dan dapat dikoordinasikan secara tersusun tanpa merugikan banyak kesalahan dalam suatu pembiayaan pada perusahaan maupun lembaga-lembaga besar pada pemerintahan.

Pada suatu lembaga besar pemerintah dinas memiliki penyusunan laporan keuangan untuk sebagai tumpuan perhitungan pembiayaan-pembiayaan alokasi pada anggaran-anggaran terutama anggaran belanja untuk pemerintah dinas. Laporan keuangan yang efektif dan efisien akan mengurangi kesalahan pada perhitungan pembiayaan pemerintah dinas. Laporan keuangan memiliki peran untuk menghitung pada pendapatan, spt perpajakan pegawai, anggaran belanja, dan pembiayaan yang dikeluarkan serta menjadikan bahan landasan pengendalian yang mempunyai konsekuensi hukum.

Dalam penyusunan laporan keuangan terutama anggaran laporan harus menyesuaikan dengan kondisi sebuah sistem akuntansi keuangan pada lembaga pemerintah dinas sehingga laporan keuangan tersebut dapat mewujudkan realisasi anggaran pada pemerintah. Pada proses penyusunan anggaran, sering terjadi tidak terpenuhinya anggaran yang diinginkan. Hal ini maka diharapkan meningkatkan

kredibilitasnya dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang baik.

Sistem perencanaan memerlukan pengendalian yang sangat produktif, karena mengandalkan tolak ukur untuk menilai pelaksanaan, meningkatkan korespondensi, koordinasi antarpemerintah, dan membantu dalam menentukan pilihan yang tepat. Rencana belanja difokuskan sebagai mekanisme administrasi moneter untuk mengendalikan kebutuhan keuangan masyarakat atau masyarakat secara umum. Dengan demikian, penelitian mengenai anggaran (Poerwanto, 2017) yang menyimpulkan bahwa anggaran yaitu suatu kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam suatu uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Menurut Munandar (2010:1) anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Oleh karena itu, anggaran (*budgeting*) memiliki banyak keuntungan terutama untuk mengalokasikan biaya-biaya yang dibutuhkan.

Anggaran mempunyai proses penyusunan anggaran yakni penganggaran, yang dimulai pembuatan panitia, pengumpulan dan pengklasifikasi data, pengajuan rencana fisik, dan keuangan tiap-tiap seksi, bagian, divisi, penyusunan secara menyeluruh, merevisi dan mengajukan kepada pimpinan puncak untuk disetujui dan dilaksanakan. Dengan demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang untuk meringankan dan mengondusif pekerjaan pelaksanaan pada setiap periode ke periode berikutnya adapun juga untuk mengusulkan anggaran dana kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup agar kebutuhan yang diinginkan terpenuhi.

METODE

Dalam melakukan penelitian penulis memilih Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang sebagai objek penelitian, dan penulis sendiri mengangkat permasalahan dalam bidang penyusunan anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten karawang dalam satu tahun di tahun 2023.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mengarah kepada studi kasus terhadap proses dan prosedur yang diterapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang secara menyeluruh dan selengkap-lengkapannya sehingga memperoleh data yang baik.

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu dimana data dan informasi yang telah diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, dideskripsikan secara kualitatif. Langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data.
2. Tahap pengelolaan data, data yang sudah terkumpul di dalam tahap pengumpulan data kemudian harus diolah kembali.
3. Menganalisis data laporan anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup dengan perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi.
4. Penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Laporan anggaran merupakan laporan yang berisi rincian kegiatan belanja yang terjadi selama satu tahun periode dan bertujuan untuk memberikan informasi anggaran yang dialokasikan. Berikut merupakan laporan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Tahun 2022.

Gambar Laporan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran
	Bidang Urusan Lingkungan Hidup	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
a	penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 14.701.000
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 14.701.000
c	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 10.800.619.500
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 26.891.400
e	penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Rp 12.818.200
f	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 492.507.800
g	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 36.896.000
h	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 57.521.000
i	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 75.500.000
j	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 64.800.000
k	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 62.715.000
l	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 5.500.000
m	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 341.860.000
n	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 51.610.000

No	Uraian	Anggaran
o	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 871.939.200
p	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Rp 339.890.800
q	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 175.000.000
II	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
a	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp 187.712.000
b	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp 64.122.000
III	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	
a	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Rp 1.806.187.000
b	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp 230.848.400
c	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 1.284.010.500
IV	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
a	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Rp 15.217.974.900
b	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Rp 222.970.900
V	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah berbahaya dan Beracun B3	
a	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp 49.287.000
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
a	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Rp 544.719.600
VII	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
a	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Rp 158.482.500
b	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Rp 73.856.000
VIII	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
a	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp 66.527.000
IX	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
a	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Rp 68.782.400
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Rp 72.142.400
X	Program Pengelolaan Persampahan	
a	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Rp 137.377.000
b	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Rp 175.080.000
c	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp 22.300.039.200
d	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp 139.150.500
e	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp 5.676.068.800
JUMLAH TOTAL		Rp 61.920.809.000

Gambar Laporan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Tahun 2022 (Lanjutan)

PEMBAHASAN

Laporan anggaran merupakan laporan yang berisi rincian kegiatan belanja yang terjadi selama satu tahun periode dan bertujuan untuk memberikan informasi anggaran yang dialokasikan, yang nantinya akan menjadi pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang dengan Bapenda dan Bupati Karawang. Pada Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang laporan realisasi anggaran belanja dibedakan berdasarkan dengan program yang akan dilaksanakan. Adapun nominal anggaran dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang pada tahun 2022 sebesar Rp 61.920.809.000,- anggaran ini sendiri diperoleh dari APBD Kabupaten Karawang. Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang dianggarkan sesuai dengan kebutuhan program kerja tahun tersebut, dengan harapan program kerja yang dilaksanakan akan mencapai target atau tujuan yang sudah disepakati diawal bersama.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang maka dapat disimpulkan:

Prosedur penyusunan anggaran Dinas Pangan Kabupaten Karawang telah sesuai dengan PERBUB No 50 Tahun 2016 Pasal 8 Point 1-3 yang berisi tentang program kerja, rencana kerja dan pelaporan keuangan (belanja). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang memperoleh dana anggaran bersumber dari APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah. Adapun yang menjadi sumber pendapatan asli daerah tersebut, yaitu dana dari berbagai retribusi, pengajuan atas ijin yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

Kinerja suatu instansi pemerintah dinilai dari anggaran belanja pada instansi pemerintah tersebut yang jika anggaran belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya maka dapat diasumsikan jika Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang baik dalam kegiatan maupun program kerjanya.

REFERENSI

- Agustina, A A M. (2019). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Atambua. *Jurnal Akuntansi (JA) Volume 6, No. 3* , 63 s/d 86.
- Fio, A K D. (2014). Implementation of Payroll Accounting As An Effort To Improve The System of Internal Control. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) VOL 14 No.1* , 5469-5729.
- Peraturan Bupati Kabupaten Karawang No 50 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Pasal 8 No1-3
- PerMen KEMENDAGRI No 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Pasal 1.

Kieso, D. E. (2016). *Intermediate Accounting IFRS Edition. Volume Pertama.*

United States of America: John Wiley & Sons.

Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi.* Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Prasetya, G E. (2017) *Penyusunan dan Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta.

<https://www.karawangkab.go.id/dokumen/lakip-dlhk-tahun-2022>